

No. 08 TAHUN KE - 72, AGUSTUS 2025

ISSN: 1411 - 8505

ROHANI

Menjadi Semakin Insani



Rp 20.000,00 / Luar Jawa Rp 22.000,00
Belum termasuk ongkos kirim.

Iman Katolik dan Kebangsaan

Tuhan Yesus Bekerja: Kesaksian Iman Seorang Perwira Polri | Claret dan *Latihan Rohani*
Apa Kata Alkitab tentang Hormat pada Negara? | Religijs Merayakan Pesta HUT RI



ISSN: 1411 - 8505

PENANGGUNG JAWAB
G.P. Sindhunata, SJ

PEMIMPIN REDAKSI
Antonius Sumarwan, SJ

KOORDINATOR
Frederick Ray Popo SJ

REDAKSI
Ishak Jacues Cavin, SJ
Klaus Heinrich Raditio, SJ
Benediktus Juliar Elmawan, SJ
Arnold Lintang Yanviero, SJ
Petrus Craver Swandono, SJ

ARTISTIK
Willy Putranta

KEUANGAN
Widarti

PROMOSI & IKLAN
Slamet Riyadi

ADMINISTRASI, SIRKULASI, dan DISTRIBUSI
Francisca Triharyani
Anang Pramuriyanto

HUBUNGI KAMI!

Redaksi:
rohanimajalah@gmail.com
Administrasi/distribusi:
rohani.adisi@gmail.com
Jl. Pringgokusuman
No. 35, Yogyakarta 55272
0274.546811, 085729548877
0274.546811
Lokapasar:
Yayasan Basis Book Store

DAFTAR ISI

KATA REDAKSI

1 | Membaca Undang-Undang yang Menginspirasi

Antonius Sumarwan, SJ

SAJIAN UTAMA

8 | Iman Katolik dan Tanggung Jawab Kebangsaan

Yanuar Nugroho

16 | Iman Katolik dan Prinsip Kemanusiaan dalam Perang Modern

Marsekal Pertama TNI Agus Pramono, Ph.D.

22 | Pendaran Persaudaraan Sejati: Peran Awam Katolik dalam Masyarakat yang Beragam

Angga Indraswara, SJ

OLEH-OLEH REFLEKSI

28 | Tuhan Yesus Bekerja: Kesaksian Iman Seorang Perwira Polri

Komisaris Polisi Antonius Trias K.

BAGI RASA

34 | Menyelami Pancasila sebagai Suluh Diplomasi Indonesia

Aloysius Selwas Taborat

SABDA YANG HIDUP

39 | Apa Kata Alkitab tentang Hormat pada Negara?

Bobby Steven, MSF

KAUL BIARA

43 | Religius Merayakan Pesta HUT RI

Paul Suparno, SJ

RUANG DOA

48 | Waktu Memilih yang Baik

Laurensius Herdian, SJ

BELAJAR TOKOH

52 | Claret dan Latihan Rohani

Carol B. Soares, CMF

KOMIK

56 | Tirakatan Tofan18

FOTO COVER: Kopol Antonius Trias Kuncorojati ketika dilantik menjadi Kasatreskrim Bengkulu.
(Dok. Pribadi)

CARA BERLANGGANAN:

Hubungi agen setempat atau langsung ke bagian Distribusi Majalah ROHANI. Harga eceran: @ Rp20.000,00 langganan 12 bulan Rp240.000,00 (belum termasuk ongkos kirim), langganan 1 tahun dibayar di muka. **Pembayaran Melalui: BCA 1263333300 a.n.Yayasan Basis.**

Redaksi menerima naskah yang sesuai dengan rubrik yang tersedia. Panjang karangan maksimal 11.000 karakter (3-4 hlm. A4 spasi 1). Kirim ke rohanimajalah@gmail.com dengan disertai nama lengkap, alamat, dan nomor rekening. Redaksi berhak menyunting semua naskah yang masuk ke meja redaksi. Tema untuk edisi September 2025 adalah "Celah untuk Diakon Perempuan?" dan Oktober 2025 adalah "Childfree dan Isu-Isu Aktual Moral Keluarga". Tanggal waktu pengiriman naskah adalah tanggal 5, satu bulan sebelum edisi tersebut diterbitkan.

Iman Katolik dan Tanggung Jawab Kebangsaan

Iman Katolik selalu terarah keluar dari diri sendiri. Dalam konteks Indonesia, iman Katolik menuntut pengabdian kepada bangsa dan negara. Jalan pengabdian tersebut kadang terasa sunyi karena diabaikan, kadang terdengar lantang karena menampakkan integritas di tengah nafsu kekuasaan. Sebagai umat beriman, perjuangan dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan menuntut kehadiran kita dalam masyarakat, birokrasi dan politik.

YANUAR NUGROHO | Dosen STF Driyarkara Jakarta, Deputy II Kepala Staf Kepresidenan RI 2015-2019, Koordinator Tenaga Ahli Seknas SDGs Bappenas 2022-2024

SERING kali, kita memahami iman secara sempit: sebagai relasi pribadi antara manusia dan Allah, yang terwujud dalam doa, sakramen, dan kehidupan rohani yang bersifat privat. Namun, dalam tradisi Katolik, iman selalu memiliki wajah publik. Ia menuntut perwujudan dalam tindakan nyata, terutama di tengah kehidupan bersama sebagai warga masyarakat dan bangsa.

Konsili Vatikan II melalui *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa Gereja

tidak berdiri terpisah dari dunia, melainkan hadir dan terlibat secara aktif di dalamnya. Dalam kalimat pembukanya yang terkenal, dokumen itu menyatakan:

"Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan umat manusia, terutama mereka yang miskin dan menderita, adalah juga kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus." (GS, no. 1)



www.parokimandan.com

Ini adalah panggilan yang sangat jelas: iman tidak boleh menjadi pelarian dari dunia, melainkan kekuatan untuk menebus dan membarui dunia. Gereja dan setiap orang Katolik sebagai anggota tubuh Kristus, terpenggil hadir secara nyata dalam dinamika sosial, politik, dan kebangsaan. Kehadiran Gereja bukan sebagai dominasi moral, tetapi kesaksian kasih dan kebenaran.

Namun, realitas hari ini menunjukkan ruang publik kita sedang terluka. Integritas terkikis oportuniste politik, kebijakan publik tersandera kepentingan jangka pendek, dan etika sosial tergerus budaya permisif yang mengaburkan batas benar-salah. Dalam suasana ini, kehadiran warga Katolik yang setia pada iman dan berani terlibat dalam

urusan publik menjadi bukan hanya penting, tetapi mendesak.

Di tengah tantangan tersebut, pertanyaannya bukan lagi "Haruskah umat Katolik terlibat dalam kehidupan kebangsaan?" melainkan "Bagaimana umat Katolik mewujudkan imannya dalam dunia yang sedang membutuhkan kesaksian kebenaran dan kasih?"

Pertanyaan ini tak hanya berlaku bagi para imam atau biarawan-biarawati, tetapi juga bagi siapa pun yang hidup dan berkarya di ruang-ruang sekuler: birokrasi, politik, akademisi, pelayanan sosial, dan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Iman yang hidup adalah iman yang menyebar: berakar dalam kasih Allah dan berbuah dalam keberpihakan kepada sesama, serta tanggung jawab kepada tanah air.

Iman Katolik:**Sumber Etos Pelayanan**

Iman Katolik tak hanya memelamatkan; ia juga memampukan. Ia membentuk hati nurani dan mengarahkan tindakan. Dalam tradisi Gereja, iman bukanlah sekadar pengakuan akan kebenaran ilahi, tetapi juga dorongan untuk bertindak adil, hidup jujur, dan mengasihi dengan sungguh. Karena itu, iman Katolik adalah sumber etos pelayanan yang radikal: pelayanan yang tidak berpangkal pada ambisi pribadi, tetapi cinta akan kebaikan bersama (*bonum commune*).

Yesus sendiri memberi teladan yang membalik logika kekuasaan dunia. Ia berkata, "Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu" (Mat. 20:26). Ini prinsip dasar pelayanan Kristen: kekuasaan bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk mengankat; bukan untuk mengambil, melainkan untuk memberi.

Etos ini menjadi semakin penting dalam konteks birokrasi dan pemerintahan, letak godaan untuk menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi atau kelompok begitu nyata. Ketika birokrasi kehilangan jiwa pelayanannya, yang tersisa hanyalah mesin administrasi hampa nilai. Di sinilah iman Katolik menawarkan yang sangat mendasar: orientasi pelayanan yang dilandasi kasih, keadilan, dan martabat manusia.

Dokumen *Compendium of the Social Doctrine of the Church* menegaskan bahwa pekerjaan dalam

bidang politik dan pemerintahan harus dianggap "tugas luhur kasih" (*Compendium*, no. 565). Melayani dalam pemerintahan bukan bentuk kompromi terhadap iman, melainkan perwujudan nyatanya—selama dijalani dengan nurani yang terang dan komitmen memuliakan Tuhan lewat tindakan bermartabat.

Di Indonesia, di mana integritas birokrasi terus diuji, kehadiran ASN, pejabat publik, dan aparaturnya yang berakar pada nilai-nilai iman Katolik dapat menjadi saksi hidup bahwa layanan publik bisa dijalankan secara bermoral. Kejujuran, profesionalisme, pengabdian tanpa pamrih, dan keberanian untuk bersikap benar di tengah tekanan sistem. Itulah buah iman yang sungguh dihidupi.

Lebih dari itu, etos pelayanan juga menyangkut kepekaan sosial: keberpihakan pada yang lemah, perhatian pada yang tertinggal, dan upaya memastikan setiap kebijakan, sekecil apa pun, berpihak kepada martabat manusia dan keutuhan ciptaan. Dengan demikian, iman Katolik menuntun bukan hanya cara kita bekerja, tetapi juga kepada siapa kita bekerja: untuk Tuhan yang hadir dalam diri sesama, terutama yang paling kecil dan paling rapuh.

Tanggung Jawab Ganda Warga Beriman

Menjadi Katolik di Indonesia berarti memikul dua tanggung jawab sekaligus: sebagai orang beriman dan sebagai warga negara. Dua identitas ini bukan beban saling meniadakan,

tetapi panggilan ganda saling memperkaya. Seperti dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II dalam *Christifideles Laici*, "Iman bukanlah pelarian dari dunia, melainkan kekuatan untuk terlibat di dalamnya secara lebih mendalam." Iman yang benar justru memperkuat tanggung jawab sipil, bukan melemahkannya.

Dalam kerangka ini, menjadi Katolik bukan hanya menjadi baik secara pribadi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang adil, damai, dan manusiawi. Seperti ditegaskan Charles Taylor dalam *A Secular Age* (2007), ruang publik modern tidaklah bebas nilai; sebaliknya, ia justru menuntut kehadiran etika dan spiritualitas untuk menjaga agar politik dan kebijakan tidak kehilangan arah moralnya. Maka, kehadiran orang Katolik di ruang publik bukanlah intervensi agama atas negara, tetapi kontribusi etis atas arah kehidupan bersama.

Sayangnya, dalam praktiknya, kita masih menemukan dikotomi palsu: seolah-olah menjadi orang Katolik yang taat harus menghindari dunia politik, birokrasi, dan urusan sipil. Padahal, justru di sinilah iman diuji dan diwujudkan. Para Papa Konsili Vatikan II menegaskan dalam *Apostolicam Actuositatem* (no. 5) bahwa kaum awam dipanggil "untuk memperbarui tata dunia dengan terang Injil". Artinya, umat Katolik tak boleh menjadi minoritas sunyi di negeri ini, tetapi harus menjadi garam dan terang yang memberi rasa dan arah kehidupan bangsa.

Di Indonesia, keterlibatan warga Katolik dalam kehidupan berbangsa adalah konsekuensi iman itu sendiri. Menghayati iman berarti juga mencintai tanah air, memperjuangkan keadilan sosial, menegakkan kebenaran dalam kebijakan publik, dan bersikap kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan struktural. Iman dan kewarganegaraan bukan dua jalan yang terpisah, tetapi dua arah yang saling menyatu dalam panggilan hidup.

Pemikir sosial Katolik seperti José Casanova (*Public Religions in the Modern World*, 1994) bahkan menunjukkan agama dapat menjadi aktor transformasi sosial bila bersedia hadir dalam ruang publik sebagai kekuatan etis, bukan hegemonik. Artinya, kehadiran umat Katolik di bidang hukum, pendidikan, ekonomi, atau birokrasi—selama dijalani dengan integritas dan kepekaan iman—adalah bentuk kesaksian sah dan strategis membangun bangsa.

Lebih jauh, menjadi warga negara yang beriman berarti sadar bahwa demokrasi, keadilan sosial, dan kebijakan publik bukan semata urusan teknis, tetapi juga ranah spiritual. Sebab, pada akhirnya, ini tidak hanya soal taat pada hukum negara, tetapi kasih pada sesama, terutama mereka yang tertinggal, terpinggirkan, dan tertindas. Di sinilah iman dan kewarganegaraan bertemu: dalam praksis keadilan, solidaritas, dan cinta sosial (*caritas socialis*).

Iman di Birokrasi:**Jalan Sunyi yang Strategis**

Bagi banyak orang, birokrasi sering dipandang sebagai sistem kaku, teknokratis, jauh dari nilai-nilai spiritual. Padahal, di balik aturan, formulir, dan rapat-rapat kebijakan, birokrasi adalah arena konkret di mana keputusan yang memengaruhi hidup jutaan orang diambil setiap hari. Maka, kehadiran orang-orang Katolik di sana bukan sekunder, tetapi justru vital.

Di sini, iman bukan sekadar identitas pribadi yang dibawa diam-diam ke kantor. Iman adalah sumber orientasi moral yang membentuk cara pandang, cara bersikap, dan cara bertindak dalam menghadapi dilema-dilema kebijakan. Di tengah tekanan sistemik, budaya kompromi, dan godaan akan kuasa, iman menjadi jangkar yang menjaga integritas. Simone Weil, filsuf Katolik Prancis bilang, "Integritas adalah keheningan batin yang tak dapat dibeli oleh sistem." Bagi birokrat beriman, keheningan batin ini menjadi kekuatan bertahan sekaligus memperbaikinya.

Pengalaman saya selama bekerja dalam pemerintahan memperlihatkan pentingnya keteguhan nilai dalam menghadapi realitas yang tidak selalu sejalan dengan idealisme. Ada kalanya keyakinan moral diuji; ada kalanya suara minoritas tak didengar. Namun, justru di sanalah makna kesetiaan: pada kebenaran, bukan kepentingan; pada keadilan, bukan kekuasaan.

Iman Katolik memberi kekuatan untuk tetap bekerja dengan hati, meskipun sistem tak selalu adil. Ia memampukan kita bertahan tanpa menjadi sinis, berharap tanpa menjadi naif. Seperti ditekankan dalam *Evangelii Gaudium* (no. 205), "Gereja ingin menyertai semua proses yang membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi." Dan, birokrasi adalah salah satu proses itu—sekalipun kadang tidak terlihat mulia, justru tampak sangat duniawi.

Karena itu, ide pembentukan komunitas-komunitas seperti Birokrat Muda Katolik menjadi sangat penting. Ia bukan hanya tempat pertemuan sosial atau kegiatan rohani, tetapi ruang refleksi, pembinaan karakter, dan pembaruan niat pelayanan. Di tengah birokrasi yang cenderung netral secara nilai, komunitas seperti ini bisa menjadi oasis yang menumbuhkan kesadaran: pekerjaan kita bukan hanya demi kinerja, tetapi juga tanggung jawab moral kepada masyarakat dan Tuhan.

Menjadi Katolik dalam birokrasi memang jalan yang sunyi. Tak ada sorotan, tak ada pengakuan khusus. Namun, justru karena sunyilah, kesaksian itu kuat. Ibarat garam yang tak terlihat tetapi memberi rasa, birokrat Katolik yang setia pada iman adalah saksi diam yang menjaga kebijakan tidak kehilangan nurani.

Birokrat Katolik jelas bukan mayoritas. Namun, seperti ditekankan oleh *Compendium* (no. 406), kehadiran pribadi-pribadi beriman dalam struktur sosial-politik adalah

"tanda pengharapan bagi masyarakat yang lebih adil dan bermartabat". Maka, meski jalannya sunyi, peranannya strategis. Justru di situlah iman menemukan maknanya: bukan hanya dalam kesalehan pribadi, tetapi dalam keberanian untuk tetap setia pada kebaikan di tengah arus yang bertentangan.

Politik sebagai Cinta

Banyak orang, termasuk umat Katolik, memandang politik dengan rasa curiga, jijik, bahkan apatis. Dianggap kotor, penuh intrik, dan jauh dari nilai-nilai iman. Namun, justru karena itu, politik butuh kehadiran orang-orang beriman yang tak hanya kritis, tetapi juga mencintai. Sebab pada dasarnya, politik adalah jalan membangun *bonum commune*; dan dalam terang iman Katolik, kebaikan bersama tak mungkin dibangun tanpa cinta.

Paus Fransiskus dalam *Fratelli Tutti* menyatakan dengan tegas: "Politik, lebih dari seni pemerintahan, adalah bentuk tertinggi dari kasih jika dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada kebaikan bersama" (FT, no. 180).

Inilah yang oleh beberapa teolog disebut sebagai *agape politik*: politik sebagai tindakan cinta sosial, bukan

hanya kalkulasi kekuasaan. Dalam perspektif ini, terlibat dalam politik bukan berarti "mencemari diri", tetapi justru menjawab panggilan mencintai dalam skala lebih luas: mencintai bangsa, mencintai yang miskin, mencintai keadilan.

Namun, politik sebagai cinta hanya mungkin jika didasari dua hal: integritas dan belas kasih. Integritas

menjaga agar kita tak kehilangan arah; belas kasih menjaga agar kita tidak kehilangan nurani. Tanpa keduanya, politik akan berubah menjadi panggung egoisme kolektif yang membangun kepentingan pribadi dengan retorika publik. Di sinilah iman berperan: sebagai suara hati yang terus mengingatkan kekuasaan adalah sarana, bukan tujuan; bahwa kebijakan harus berpihak, bukan hanya berlaku netral; bahwa keberpihakan pada

yang lemah bukan pilihan moral belaka, tetapi mandat etis yang tak bisa ditawar.

Di Indonesia hari-hari ini, kita menyaksikan etika politik kerap dibengkokkan menjadi logika transaksional. Kekuasaan diraih dan dipertahankan demi kelangsungan elite, bukan kesejahteraan rakyat. Di tengah realitas inilah umat Katolik—

46

Kehadiran umat Katolik dalam politik Indonesia seharusnya tidak diukur dari jumlah kursi atau posisi strategis, tetapi sejauh mana kehadiran itu menjadi suara profetik keadilan, perdamaian, dan martabat manusia.



pngtree.com & www.camva.com

baik sebagai warga dan pejabat publik—perlu hadir bukan sebagai “pemain politik”, melainkan penjaga moralitas politik.

Kehadiran umat Katolik dalam politik Indonesia seharusnya tidak diukur dari jumlah kursi atau posisi strategis, tetapi sejauh mana kehadiran itu menjadi suara profetik keadilan, perdamaian, dan martabat manusia. Di sini pemikiran Hannah Arendt relevan. Dalam *The Human Condition* (1958), ia menulis bahwa politik sejati adalah tindakan kolektif menjamin bahwa “manusia dapat hidup bersama secara bebas dan setara”. Ini tugas moral, bukan hanya teknokratis.

Umat Katolik tidak boleh mundur dari ranah ini. Sebab, jika orang baik menolak terlibat dalam politik, maka politik akan dipenuhi mereka

yang tak peduli pada kebaikan. Sikap menjauh dari politik atas nama kesalahan pribadi itu bentuk kelalaian—bahkan ketinggihatian—moral. Justru karena kita beriman, kita terpanggil untuk ikut serta membentuk arah bangsa, dengan rendah hati dan cara yang etis, jujur, dan penuh kasih.

Menjadi Katolik yang terlibat dalam politik—baik langsung maupun lewat gerakan sipil, advokasi, atau edukasi publik—adalah bagian dari misi kerasulan awam yang ditegaskan dalam *Evangelii Gaudium*: “Menjadi murid misioner berarti siap untuk membawa Injil ke setiap bidang kehidupan, an sosial dan politik” (EG, no. 102).

Maka, tugas kita bukan hanya memilih dengan bijak, tetapi juga membangun kesadaran politik umat,

menciptakan ekosistem kebijakan yang etis, dan memperjuangkan agar ruang publik tidak kosong dari nilai-nilai keadaban. Di sinilah agape politik menjadi nyata: ketika kasih tak lagi tinggal di altar atau ruang doa, tetapi berjalan kaki ke lorong-lorong kekuasaan dan memperjuangkan suara yang nyaris tak terdengar—suara kaum kecil, suara bumi, dan suara nurani bangsa.

Menjadi Garam dan Terang di Indonesia

Indonesia adalah rumah kita bersama: rumah yang dibangun di atas keberagaman, diuji sejarah, dan dibentuk dinamika zaman. Sebagai umat Katolik, kita tidak dipanggil untuk hanya tinggal diam di sudut rumah itu, apalagi merasa asing atau terpinggirkan. Kita dipanggil untuk terlibat, menjaga, dan ikut merawatnya—dengan iman yang aktif, kasih yang konkret, dan komitmen kebangsaan yang matang.

Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi mayoritas yang berkuasa, melainkan minoritas yang memberi rasa: “Kamu adalah garam dunia... kamu adalah terang dunia” (Mat. 5:13–14). Garam tidak terlihat, tetapi mengubah rasa. Terang tidak bersuara, tetapi menunjukkan jalan. Begitulah seharusnya kehadiran umat Katolik di negeri ini—menjadi kekuatan moral yang sunyi, tetapi menentukan arah.

Tantangan zaman kita tidak kecil. Kita menghadapi erosi etika publik, banalitas kekuasaan, dan

komodifikasi iman. Namun, justru dalam keadaan ini, iman Katolik menemukan daya ubahnya. Ketika yang lain sibuk mencari posisi, kita hadir melayani. Ketika sistem memaksa diam, kita memilih bersaksi. Ketika kejujuran dianggap naif, kita tetap setia pada nurani. Di situlah kehadiran Katolik menjadi relevan; bukan karena dominasi, tetapi karena integritas.

Maka kepada Anda—para imam, biarawan-biarawati, aktivis awam, pelayan masyarakat, pejabat, guru, buruh, mahasiswa, siapa pun yang memeluk iman ini—saya ingin menyampaikan satu ajakan: jangan takut terlibat. Jangan takut untuk menyatukan doa dengan tindakan, misa dengan musyawarah, spiritualitas dengan solidaritas.

Bangsa ini butuh suara-suara jernih, hati-hati bersih, dan tanggungan yang rela bekerja dalam senyap demi kebaikan bersama. Jika bukan kita yang menghadirkan cahaya Kristus dalam ruang publik, siapa lagi? Kita mesti menghayati iman bukan hanya di altar, tetapi juga di meja kebijakan. Bukan hanya di ruang doa, tetapi juga di ruang sidang. Bukan hanya saat berlutut, tetapi juga saat berdiri tegas di hadapan ketidakadilan.

Indonesia tidak menunggu umat Katolik menjadi sempurna. Indonesia hanya butuh umat Katolik yang setia, yang mau hadir, yang tidak lelah mencintai. Dan, itu sudah lebih dari cukup untuk menyalakan harapan. ♦